

Kebangkitan Ekonomi China yang Tidak Sejalan Dengan Kesejahteraan Buruh

(Perbaikan Taraf hidup buruh pada masa pemerintahan Hu Jintao)

Oleh

Nur Inna Alfiah (fifi.alfiah@yahoo.com)

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Wiraraja Sumenep

Abstrak

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari karena setiap elemen kehidupan manusia mengalami perubahan baik sosial, ekonomi dan budaya akibat adanya globalisasi. Jarak tidak lagi menjadi halangan untuk sebuah negara berinteraksi dengan negara lain, bahkan antar masyarakat atau individu yang berbeda negara. Selain itu globalisasi juga membawa sebuah kemajuan baik dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Kemajuan yang dibawa oleh globalisasi memberikan dua efek yakni positif dan negatif. Sehingga dengan demikian untuk memanfaatkan kemajuan dan kemudahan yang ada dalam globalisasi bergantung bagaimana tiap individu, masyarakat bahkan negara menyikapi kemajuan dan kemudahan yang ditawarkan oleh globalisasi itu sendiri.

Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, perpindahan barang, jasa, modal teknologi dan informasi tidak bisa dibendung lagi. Batas negara bukanlah menjadi halangan untuk teknologi, informasi, barang dan jasa memasuki suatu negara. Setiap negara yang ada di dunia sudah terkena dampak akan adanya globalisasi, bahkan negara yang non demokratis pun merasakan adanya dampak dan menikmati kemudahan yang ada dalam globalisasi. Dalam globalisasi banyak negara-negara berupaya mengambil keuntungan dari adanya globalisasi ini untuk memajukan negaranya, bahkan terkadang negara-negara tersebut mengundang para investor asing untuk menanamkan modal dan berinvestasi ke dalam negaranya. Akan tetapi meskipun demikian tidak semua masyarakat yang ada di dunia ini memandang globalisasi sebagai sesuatu yang positif, justru pihak-pihak yang kontra memandang globalisasi sebagai sesuatu yang negative yang akan membawa kerusakan terutama untuk negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang terbelakang. Jika pada dahulu sebelum globalisasi menjadi sebuah fenomena, aktor dalam dunia internasional hanya terbatas pada negara sebagai pelaku utama. Akan tetapi dengan adanya

globalisasi kemudian memunculkan aktor-aktor baru yang semakin beragam seperti MNC (*Multinational Corporation*), NGO/INGO (*Non Governmental Organization*). Kedua aktor tersebut menjadi pemain yang sangat penting dalam era globalisasi saat ini.

Dalam menghadapi fenomena globalisasi tersebut tidak semua kalangan masyarakat begitu saja percaya akan manfaat dari globalisasi yang dikatakan memberikan peluang bagi negara untuk terlibat aktif serta mengambil keuntungan dari adanya globalisasi. Terdapat beberapa perspektif yang pro dan kontra terhadap fenomena dari globalisasi. Perbedaan perspektif tentang globalisasi kemudian membuat Held dan Mc Grew dalam "*Global Transformation*" (2001) membagi pandangan-pandangan tentang globalisasi ke dalam tiga kubu, yakni Hyper-globalist, Sceptics-globalist, dan Transformationalis (David held *et. al*, 1999). Kaum hyper-globalis percaya bahwa globalisasi adalah sejarah yg niscaya dan tak bisa dihindarkan. Mereka juga meyakini bahwa globalisasi memberikan ruang yang terbuka bagi semua aktor internasional dan semua negara bisa mengambil keuntungan dari fenomena globalisasi. Sedangkan kaum skeptis-globalis percaya bahwa globalisasi adalah jargon yg di dalamnya berlangsung dominasi dari negara-negara kaya dan aktor-aktor ekonomi besar. Kemudian kaum transformasionalis meyakini bahwa globalisasi memang berlangsung namun peran negara harus diperkuat dan struktur ekonomi internasional harus direformasi. Adanya perspektif tersebut bergantung bagaimana tiap negara menyikapi adanya fenomena globalisasi.

MNC yang merupakan salah satu aktor dalam globalisasi tidak dapat dipisahkan, dimana MNC sendiri muncul karena adanya globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi tersebut menyebabkan batas-batas negara menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional suatu negara dengan perekonomian internasional menjadi semakin erat. Merujuk pada tiga pandangan yang dikemukakan oleh Held dan Mc Grew tersebut, Penulis disini mencoba berpihak pada kaum transformasionalis meyakini bahwa globalisasi memang berlangsung namun peran negara harus diperkuat dan struktur ekonomi internasional harus direformasi. Disini penulis akan mencoba menjabarkan bagaimana globalisasi dengan menggunakan perspektif transformasionalis dari David Helad dan Mc Grew bisa menjadikan China maju dan berkembang hingga saat ini. China merupakan salah satu negara yang berkembang sangat pesat baik dalam hal teknologi dan ekonomi, dimana perkembangan yang ada di China tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi berperan di dalamnya. China yang

notabene merupakan negara komunis yang masa dahulu sangatlah terpuruk dan terbelakang kemudian menjelma menjadi salah satu kekuatan raksasa ekonomi dunia menyaingi Amerika.

Akan tetapi meskipun dengan transformasionalis China bisa berkembang dengan pesat dalam bidang ekonomi, nasib akan pekerja atau buruh disana kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dimana pemerintah cenderung mengabaikan hak-hak buruh atau pekerja yang ada di China. padahal jika dikaitkan pada masa-masa pemerintahan awal komunis di China buruh merupakan “tuan” yang perlu diperlakukan istimewa oleh negara. Sehingga dalam paper ini akan difokuskan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh yang ada di China. Karena dengan sistem komunis yang ada, mereka cenderung mengabaikan hak-hak dari buruh. Oleh karena itu bahasan dari paper ini akan mefokuskan bagaimana nasib buruh di China pada masa pemerintahan Hu jintao.

Pembahasan

China atau bisa juga dikenal dengan Republik Rakyat China merupakan negara bagian Asia Timur yang merupakan negara komunis dengan penduduk terbesar di dunia. Pada awal-awal berdirinya China dengan ideologi komunisnya, pemerintah pada saat itu Mao menerapkan sistem yang tersentralisir dalam sistem komunis. Pada masa pemerintahan Mao terdapat beberapa periode yang mengawali perkembangan China, akan tetapi dari periode tersebut tidak sedikitpun memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan China. Justru dengan periode lompatan jauh kedepan dan revolusi budaya yang dilakukan oleh Mao menjadikan China semakin terpuruk. Karena pada dasarnya pada masa pemerintahan Mao meskipun teknologi sudah berkembang, Mao lebih cenderung menggunakan tenaga manusia dibanding dengan mengembangkan teknologi.

Akan tetapi setelah berganti rezim, pemerintah China pada masa itu kemudian sadar bahwa jika ingin menjadi maju seperti negara lain, maka China perlu membuka diri dan berinteraksi dengan dunia luar. Setelah berakhirnya era Mao, Deng Xiopeng kemudian menjadi pimpinan menggantikan Mao mengeluarkan sebuah pernyataan yang dianggap merupakan awal dari reformasi China menuju keterbukaan. Pernyataan Deng Xiopeng tersebut berbunyi *“tidak jadi masalah apa warna kucing itu, sepanjang ia bisa menangkap tikus”* (Shenkar, Oded.2007). Pada masa pemerintahannya Deng Xiopeng melakukan reformasi pada empat bidang, yaitu

politik, ekonomi, budaya dan hukum. Dalam bidang politik mengeluarkan kebijakan reformasi dan keterbukaan ke dunia luar, disini Deng Xiopeng memastikan bahwa belajar dari dunia luar untuk mengembangkan China akan menjadi tujuan dasar kerjasama ekonomi. Deng mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk berdagang dan menanam investasi di China serta memberi izin pada perusahaan-perusahaan China terpilih untuk melakukan hal yang sama di luar negeri. Namun, semua ini dilakukan dengan persyaratan yang diatur dengan sekasama, termasuk kontrol bidang ekspor dan impor, sistem mata uang ganda, dan proses persetujuan pemerintah yang sanagat teliti (Melvin, Sheila.2008).

Dari sinilah transformasi seperti yang dikemukakan oleh David Held dan Mc Grew mengenai transformasionalis. Transformasionalis yang meyakini bahwa globalisasi memang berlangsung dan dalam globalisasi terbuka kesempatan yang sangat luas bagi tiap negara untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari adanya globalisasi. Namun yang perlu digaris bawahi dalam perspektif transformasionalis ini adalah peran Negara yang perlu di diperkuat dan struktur ekonomi internasional harus direformasi. Dalam konteks keterbukaan yang di kemukakan oleh Deng Xiopeng, China yang dulu menganut sistem ekonomi yang tertutup dari dunia luar kemudian berusaha belajar dari dunia luar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negaranya. Karena apabila China masih menerapkan sikap tertutupnya dengan dunia luar maka ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan terserap, dimana untuk menguasai dan memperoleh pengetahuan teknologi tersebut perlu belajar dari negara-negara maju. Oleh karena itu kebijakan Deng Xiopeng mengenai keterbukaan dengan dunia luar memawa China sendiri kearah kemajuan tekhnolgi seperti saat ini.

Akan tetapi meskipun Investasi dan perusahaan asing masuk di China tidak begitu saja membuat perusahaan asing atau investasi-investasi yang ada bisa melenggang masuk ke China. Peran pemerintah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Deng Xiopeng mengenai reformasi dan keterbukaan dengan dunia luar, pemerintah China masih memegang kontrol terhadap investasi dan usaha asing yang masuk. Dimana pemerintah China mengatur dengan seksama investasi asing dalam berbagai sektor, daerah, jenis, dan ukuran serta menggunakannya untuk mendukung prioritas perkembangannya. Pemerintah China mewajibkan setiap perusahaan-perusahaan asing di berbagai sekator untuk membentuk usaha gabungan (*joint venture*) dengan perusahaan China (Melvin, Sheila.2008:58). Adanya *Joint venture* inilah kemudian memberikan

keuntungan tersendiri bagi China, dengan bergabung dengan perusahaan asing maka secara otomatis perusahaan China akan belajar bagaimana penggunaan teknologi serta manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan. Banyaknya investasi dan berdirinya perusahaan-perusahaan asing menjadikan ekonomi China maju dengan naiknya pertumbuhan pendapatan perkapita serta kesejahteraan hidup rakyat China yang mulai meningkat.

Kebijakan Deng Xiopeng melalui keterbukaan terhadap negara luar kemudian membuat FDI (*Foreign Direct Investment*) mulai banyak masuk ke dalam China. Pemerintah pada saat itu juga menerapkan otonomi terbatas pada provinsi-provinsi di dalam negaranya dengan memberikan kelonggaran untuk menciptakan sebuah wilayah industri sesuai dengan kapabilitas provinsi tersebut. China juga mendorong diciptakannya sentra-sentra kegiatan perekonomian, industri dan perdagangan bebas bahkan pusat teknologi canggih di provinsi-provinsinya dengan membentuk FTZ (*Free Trade Zone*), EDZ, HDZ. China pun memanjakan setiap investor yang ingin berinvestasi di China, dengan membangun infrastruktur-infrastruktur yang memadai bagi para investor (Ghani, N.c.,2013). Selain itu Investor di China juga akan mendapati kemudahan birokrasi, dimana sistem “satu atap” perizinan dan “*one day service*” sudah menyambut para investor di pintu masuk bandara dan pelabuhan. Adanya keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kemudian mendorong para investor-investor asing untuk berinvestasi di China. Disamping itu masuknya perusahaan-perusahaan berskala internasional semakin memberikan kontribusi bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat China karena tersedianya lapangan pekerjaan.

Masuknya investasi asing dan berdirinya perusahaan-perusahaan internasional kemudian memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi China. Dimana sebagian masyarakat ataupun kritikus menganggap bahwa China sangat bergantung pada investasi asing sehingga dari ketergantungan tersebut China yang komunis akan mudah dikendalikan oleh Barat. Keterbukaan terhadap investasi dan perusahaan asing juga dikritik karena meskipun ekonomi China maju dan berkembang pesat, kesejahteraan terhadap buruh cenderung diabaikan meskipun ada undang-undang yang menjamin tentang buruh. Keterbukaan terhadap investasi asing tidak diimbangi oleh pemerintah yang ada untuk menyejahterakan buruh, dimana hak-hak buruh cenderung diabaikan oleh pemerintah. Jika di negara-negara lain terdapat banyak serikat yang akan menjamin dan mengapresiasi keinginan dan permintaan buruh, maka di China hal itu tidak terjadi karena hanya ada satu serikat buruh yang diakui oleh pemerintah China. Dalam Partai

Komunis, China hanya mengakui satu serikat buruh yaitu Federasi Buruh Seluruh China akan tetapi serikat ini cenderung berpihak dengan para pengusaha asing ketika terjadi konflik dengan buruh. Kondisi yang demikian menjadikan kesenjangan sosial yang terjadi di China semakin melebar, karena mayoritas dari rakyat China sendiri berprofesi sebagai buruh di berbagai pabrik perusahaan-perusahaan internasional. Adanya sistem buruh kontrak kemudian menjadi momok tersendiri bagi buruh yang ada di China, karena kepastian akan masa depan hidupnya tidak terjamin lagi ketika kontrak dari perusahaan terhadap buruh tersebut berakhir.

Sejak partai komunis menguasai China pada 1 Oktober 1949 buruh dinyatakan sebagai tuan atas negaeri China. Dan memang China dijadikan sebuah pabrik raksasa, dimana para buruh menduduki tempat paling tinggi. Pada masa tersebut para buruh mendapat aneka macam jaminan sosial, seperti sewa perumahan yang amat rendah, tarif listrik dan air yang rendah, asuransi kesehatan, biaya pendidikan untuk anak-anak dan tentu saja jaminan pensiun di hari tua. oleh karena itu sistem perburuhan Chian pada masa itu sering dinamai dengan sistem “mangkuk besi” (*tie fan wan*) karena jaminan yang sedemikian lengkap, total dan seumur hidup, lain dari mangkuk dari tembikar atau porselin yang bisa pecah (I Wibowo. 2007). Keistimewaan yang didapat buruh pada masa itu kemudian berubah tatkala Deng Xiopeng mengumumkan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Hal tersebut tentu membuat masyarakat China yang ada gempar, karena jika dulu petani harus bekerja bagi semua dan memiliki semua. Maka dalam sistem yang baru petani boleh bekerja pada dirinya sendiri dan mengambil keuntungan. Selain itu juga sistem ekonomi kemudian membawa pemerintah menerapkan keputusan tentang privatisasi terhadap perusahaan negara serta kebijakan mengenai penggabungan perusahaan yang ada dengan perusahaan asing. Hal tersebut kemudian memunculkan terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap sebagian buruh, serta tidak bekerja lagi di perusahaan.

Jaminan kehidupan buruh yang didapat pada masa sebelum reformasi kemudian menjadi sebuah problem bagi masyarakat China sendiri. Dimana mereka dituntut untuk bekerja tanpa ada jaminan kehidupan dengan standar gaji yang dinilai kurang. Reformasi ekonomi memunculkan adanya demonstrasi dari masyarakat China yang menuntut peningkatan kesejahteraan, meskipun dalam hal ini demonstrasi yang ada hanya berskala kecil (karena adanya tekanan pada buruh terutama yang dilakukan oleh serikat buruh yang di gaji oleh pemerintah). Demonstrasi yang biasanya dilakukan adalah mereka hanya menuntut gaji serta penyediaan lapangan kerja akibat

pemutusan hubungan atau pemecatan dari perusahaan akibat dari privatisasi serta merger dan akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan asing. Menanggapi hal tersebut pada tahun 1994, pemerintah memperkenalkan program untuk membantu buruh yang mengalami PHK, yaitu “Proyek Mempekerjakan Lagi” (Solinger, Dorothy J .2002).

Akan tetapi program tersebut kemudian mengalami kegagalan dikarenakan keterbatasan dana yang ada serta adanya korupsi menjadi salah satu faktor dari kegagalan program itu. Pada saat yang sama pemerintah juga mengeluarkan UU Tenaga Kerja Baru (1994), pemerintah mengeluarkan UU tersebut sebagai salah satu jalan keluar dengan meningkatnya pengangguran di China. UU Tenaga Kerja Baru itu kemudian mengenalkan sistem yang bernama “Buruh Kontrak”, buruh kontrak menunjuk pada mereka-mereka (masyarakat) yang tidak mendapatkan status buruh tetap. Meskipun dalam buruh kontrak terdapat kebijakan untuk melindungi buruh kontrak, seperti seorang buruh pria tidak boleh dipecat dari perusahaan ketika istrinya juga dipecat di perusahaan negara. Buruh veteran yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan yang kurang lima tahun lagi akan memasuki masa pensiun juga tidak boleh dipecat. Namun pada praktiknya peraturan-peraturan itu dilanggar oleh banyak manajer (I Wibowo,2007). Sehingga buruh sering menjadi bulan-bulanan serta diperlakukan sewenang-wenang oleh para manajer.

China pada masa Hu Jintao

Permasalahan mengenai peningkatan taraf hidup para buruh menjadi persoalan yang sangat mendesak di China. Karena meskipun ekonomi China mengalami peningkatan serta tingginya investor asing yang masuk menjadikan pemerintah pada saat itu mengabaikan kondisi buruh dan lebih terfokus pada bagaimana China bisa menggaet investor-investor asing yang masuk untuk menanamkan modalnya di China. Padahal jika dilihat sebagian besar masyarakat china menjadi buruh sebagai profesi utamanya ditengah ketatnya persaingan antar masyarakat China sendiri yang merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia.

Kemudian pada tahun 2003 Hu Jintao diangkat sebagai presiden China melalui kongres partai komunis ke-16, yang otomatis menjadikan Hu Jintao sebagai pemimpin ke empat China. Hu Jintao menjabat sebagai presiden selama dua periode yakni pada 2007 ia kembali terpilih dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2012. Pada masa pemerintahannya Hu Jintao dan wakilnya Wen Jiabao meneruskan program dari pendahulunya Deng Xiaoping, Jiang Zemin untuk

transformasi ekonomi bangsanya dari “komunis-sosialis” menjadi “komunis-kapitalis.” Transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pendahulu dari Hu Jintao memang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan China. Akan tetapi meskipun ekonomi meningkatkan, di sisi lain juga semakin memperlebar kesenjangan sosial dan pendapatan antara kaum kaya dengan mereka yang miskin.

Oleh karena itu peningkatan anggaran sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin kota dan desa menjadi prioritas dari pemerintahan Hu Jintao selain mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. Hal yang dilakukan oleh Hu Jintao dan wakilnya adalah merubah dan melonggarkan aturan-aturan yang memungkinkan para penghuni desa yang selama ini bekerja sebagai petani dan pekerja pabrik dengan gaji rendah pindah ke kota. Pemerintah juga telah memperbaiki jaringan kesejahteraan sosial untuk membantu para pensiunan dan korban PHK perusahaan-perusahaan yang bangkrut maupun yang telah direstrukturisasi. Banyaknya kritikan terhadap pemerintah mengenai masa depan komunis yang sebagian masyarakat menganggap bahwa China akan di kuasai oleh Barat melalui investasi dan perusahaan-perusahaan internasional membuat Hu Jintao mengeluarkan sejumlah aturan.

Aturan yang dikeluarkan oleh Hu Jintao ditujukan untuk meperlambat investasi di sejumlah sektor tertentu dan menenangkan kekhawatiran bahwa orang-orang asing memanfaatkan China, bukan sebaliknya. Aturan-aturan ini mencakup pembatasan investasi asing di bidang real estate; penngguhan akuisisi asing atas perusahaan-perusahaan nasional; aturan-aturan baru yang mengatur Merger dan Akuisisi, yang sekarang membutuhkan persetujuan pemerintah jika akuisisi tersebut melibatkan keamanan ekonomi atau merek utama China; dan persetujuan draf Undang-Undang Anti Monopoli yang dipercaya luas bertujuan mencegah perusahaan multinasional dari mendominasi industri-industri penting China (Melvin, Sheila.2008). Ini didasarkan pada masa-masa awal terbukanya China untuk investasi asing dan perusahaannya, banyak dari perusahaan-perusahaan asing diizinkan untuk dimiliki oleh negara asing di berbagai sektor. Oleh karena itulah pemerintahan Hu Jintao kemudian mengeluarkan peraturan perundangan tersebut guna melindungi perusahaan-perusahaan lokal yang ada serta untuk menjamin sistem *joint venture* yang ada tetap berlangsung.

Tindakan yang dilakukan Hu Jintao sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh paendahulunya seperti Deng Xiopeng dan Jiang Zemin terkait investasi dan perusahaan asing.

Hu Jintao bukannya anti terhadap investasi asing, hal ini dilakukan agar kontrol pemerintah semakin kuat terhadap perusahaan-perusahaan yang ada sehingga nasib buruh juga bisa terkontrol dengan baik. Hu Jintao sangat selektif dalam hal menerima setiap investasi yang datang dari luar, karena adanya persepsi dari masyarakat bahwa China tidak bisa hidup tanpa investasi asing. Adanya aturan tersebut mencoba untuk mengurangi ketergantungan China dari investasi asing serta memajukan sendiri industri-industri yang ada serta untuk meningkatkan konsumsi domestik. Sedangkan dalam masalah buruh pemerintah Hu Jintao lebih memiliki kepedulian, dimana suara buruh lebih didengarkan ini juga berhubungan dengan prioritas yang menjadi utama Hu Jintao mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat.

Permasalahan buruh yang tidak terselesaikan kemudian membuat pemerintah memuat ulang aturan-aturan yang mengatur perburuhan. Dimana sengketa-sengketa perburuhan yang ada sering diabaikan oleh para manajer perusahaan. Tercatat lebih dari 10.000 sengketa perburuhan yang terjadi di China akan tetapi semua diabaikan oleh para manajer perusahaan yang ada. Gelombang demonstrasi dan protes yang gencar dilakukan oleh para buruh kemudian menarik perhatian pemerintah pusat. Presiden Hu Jintao yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China yang sejak awal kepemimpinannya menaruh perhatian besar kepada kaum papa tidak berlambat-lambat mengubah kebijakan dalam perburuhan. Kemudian pada tahun 2008 Hu Jintao mengesahkan UU Kontrak Kerja, yang mengatur bahwa buruh yang sudah bekerja selama 10 tahun pada perusahaan yang sama berhak mendapatkan kontrak kerja tanpa batas, dan memberinya jaminan kompensasi finansial sekiranya terjadi pemutusan hubungan kerja. Legislasi ini merupakan tonggak penting untuk menyelamatkan buruh yang tidak lagi menikmati status buruh tetap (I Wibowo. 2013).

Hal ini tentu memberikan harapan baru bagi para buruh akan masa depan mereka, karena pemerintah sudah memperhatikan hak dan kebutuhan dari para pekerja buruh baik yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta. Jika pada pemerintahan sebelumnya nasib buruh tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, maka pada masa Hu Jintao berkuasa buruh kemudian menjadi prioritas utama dalam upayanya meningkatkan taraf hidup rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Undang-undang tenaga kerja yang dibuat meskipun sangat pro terhadap buruh nyatanya tidak terealisasi. Ini bisa dilihat ketika pada masa pemerintahan Hu Jintao, demonstrasi yang dilakukan oleh buruh mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Pemerintah juga mendesak perusahaan-perusahaan yang ada untuk memenuhi tuntutan gaji yang diinginkan oleh para buruh.

Pada tahun 2010 terjadi pemogokan besar-besaran yang dilakukan oleh buruh terhadap dua perusahaan internasional seperti Foxconn Technology Co Ltd dan Honda Motor Co Ltd. Pemogokan ini terjadi karena ada tuntutan dari buruh akan kenaikan gaji serta standar kerja yang sesuai dengan standar internasional. Dalam kasus Foxconn sistem kerja yang buruk yang mengakibatkan terjadinya bunuh diri menjadikan pemerintah semakin bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Dimana aturan yang di buat oleh pemerintah terkait jam kerja harus dipenuhi oleh perusahaan. Buruh tidak boleh bekerja lebih dari delapan jam sehari atau 40 jama per minggu dan harus dijamin memperoleh istirahat dua hari perminggu. Perubahan dari ketentuan ini harus disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja. Kalau perusahaan menghadapi tuntutan produksi dan ingin memperpanjang jam kerja, perusahaan yang bersangkutan harus mengadakan konsultasi dengan serikat buruh dan dengan buruh, kalau ada tuntutan mendesak untuk meminta kerja lembur; perusahaan boleh meminta buruh kerja lembur untuk jumlah waktu maksimum tiga jam per hari atau 36 jam perbulan (I Wibowo.2007). Foxconn yang merupakan perusahaan multinasional pembuat komponen elektronik terbesar di dunia dengan produk yang terkenal diproduksi Foxconn termasuk iPhone dan iPad. Foxconn terkenal sebagai perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing, perusahaan ini berlokasi di Taiwan yang banyak menari minat masyarakat China untuk bekerja di perusahaan ini. Akan tatapi erusahaan ini juga banyak melakukan pelanggaran terhadap buruh, dimana meraka memberlakukan sistem kerja lembur serta mempekerjakan anak dibawah umur. Kondisi kerja yang tidak sesuai dengan standar juga dirasakan oleh para pekerja, sehingga menyebabkan para pekerja yang ada melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Kejadian tersebut membuktikan bahwa begitu buruknya perlakuan yang diterima oleh para buruh di China, perusahaan seolah-olah melakuakn semuanya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan hak-hak yang dimiliki oleh buruh seperti yang tertuang dalam undang-undang pemerintah China.

Kejadian bunuh diri yang terjadi di Foxconn, serta demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh buruh yang menuntut pemenuhan hak-haknya membuat Hu Jintao bereaksi dengan menyatakan bahwa kenaikan upah buruh tidak boleh ditunda-tunda. Melalui Perdana Mentri China, Wen Jiabao memerintah agar upah buruh dinaikkan (I Wibowo .2013). Meskipun

dalam hal ini keputusan tersebut dianggap sedikit terlambat tapi setidaknya pemerintah pada masa Hu Jintao lebih peduli terhadap nasib buruh dibanding pada masa pemerintahan terdahulu yang lebih mementingkan kenyamanan terhadap investasi. Disini juga dapat dilihat kepedulian dari pemerintah era Hu Jintao terhadap buruh, mereka tidak menghalangi para buruh untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Adanya keputusan tersebut kemudian memaksa pabrik-pabrik, terutama milik investor asing untuk menaikkan upah buruh hingga 30 persen. Foxconn dan Honda yang paling banyak didemo massa akhirnya menaikkan upah buruhnya sebesar 24-30 persen. Pemogokan buruh Honda selama 2 minggu yang melibatkan 1900 pekerja, aksi tersebut memaksa pihak perusahaan menaikkan tuntutan kenaikan upah buruh setelah menghentikan produksi di empat pabrik mobil utama (<http://www.libcom.org>). Bahkan menteri Pertanian China menyatakan bahwa gaji pekerja migran China meningkat 60% dari tahun lalu menjadi 1.348 yuan atau 197 dollar AS per bulan (*The Economist*, 29 Juli 2010).

Meskipun masalah buruh di China sampai saat ini masih belum terselesaikan, adanya perhatian dari pemerintah setidaknya memberikan harapan bagi para buruh mengenai masa depan hidupnya. Hu Jintao selaku presiden pada saat itu meski dikatakan belum berhasil seratus persen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, setidaknya ia melakukan hal yang berbeda dari para pendahulunya yang cenderung bertindak represif terhadap para buruh. Bahkan dalam perayaan Hari Buruh 1 Mei 2010, Hu merayakannya dengan menganugerahi penghargaan bagi buruh teladan. Sejumlah 2.115 buruh teladan mendapat anugerah dari Hu. Dia menyatakan bahwa para buruh telah memberikan kontribusi sangat jelas dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi bangsa (I Wibowo.2013). Keadaan ini bukannya tidak merugikan China sendiri, karena dengan naiknya upah buruh maka investasi yang akan masuk akan berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya di China. Para investor tersebut akan lebih memilih negara lain yang mana upah buruhnya lebih kecil daripada upah buruh di China.

Menurut penulis Hu Jintao melakukan hal tersebut karena *pertama*, kondisi ekonomi China yang sudah stabil, sehingga pemerintah mencoba mengembangkan sendiri perusahaan-perusahaan yang ada tanpa bergantung kepada investasi asing. Dimana China pada saat ini melalui Badan Usaha Milik Negeranya (BUMN) sedang melebarkan produksi usahanya dengan berinvestasi di luar negeri seperti di Negara-negara Afrika dan lainnya. *Kedua*, China sudah

menguasai teknologi Barat yang canggih akibat transfer teknologi yang ada sehingga mampu berinovasi dan mengembangkan sendiri produk atau barang yang ada. Ini terbukti dengan banyaknya di jumpai barang-barang yang berlabel "*Made in China*", mulai dari peralatan rumah tangga, elektronik hingga alat transformasi dan komunikasi. *Ketiga*, Investasi dari luar akan tetap masuk ke China, karena China merupakan pangsa pasar terbesar di dunia mengingat penduduknya yang sangat besar. Ini merupakan keuntungan bagi China sendiri, karena dengan memiliki penduduk yang besar maka investor ataupun perusahaan yang ada akan tetap berinvestasi disana. Karena dengan berinvestasi di China peluang akan produknya untuk dikenal serta diminati masyarakat China semakin besar. Alasan-alasan seperti itulah yang mungkin membuat pemerintah berani memutuskan untuk menaikkan gaji buruh yang ada. Masih banyak permasalahan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah China kedepannya karena tidak hanya masalah gaji yang menjadi permasalahan para buruh, ketegasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan perlu dilakukan agar tidak semena-mena memperlakukan buruh yang ada. Karena pemerintah disini memiliki peran sangat penting dalam mengurus kesejahteraan rakyatnya.

Kesimpulan

Keadaan ekonomi China yang berkembang maju dan pesat tidak menjadikan kehidupan buruh yang ada menjadi makmur. Bahkan pada awal-awal reformasi ekonomi dikenalkan oleh Deng Xiopeng, buruh di China memiliki nasib yang tidak menentu karena adanya pemberhentian kerja atau penutupan-penutupan pabrik akibat kebijakan privatisasi pemerintah. Buruh yang dahulu pada masa komunis mendapat perlakuan istimewa dengan segala fasilitas serta jaminan hidup kemudian berubah setelah adanya reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiopeng memang menjadikan China maju dalam hal ekonomi maupun teknologi, ini bisa dilihat dari sepaik terjangan China yang mampu menyaingi Amerika sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Akan tetapi kemajuan tersebut tidak sejalan dengan kondisi dan nasib buruh yang merupakan salah satu faktor dari majunya ekonomi China saat ini.

Sejak era Deng Xiopeng segala kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap buruh kemudian berakhir, dimana pada masa-masa itu juga diperkenalkan itulah "buruh kontrak" yang semakin menjadikan buruh tidak menentu nasibnya. Pada masa-masa itu setiap pemerintah yang ada lebih menkanakan pada kepentingan dan kenyamanan para investor asing untuk menjalankan usahanya di China tanpa melihat nasib buruh yang. Meskipun sudah ada Undang-

undang yang mengatur tentang perburuhan, nasib buruh justru dikendalikan oleh para manajer perusahaan. Dimana mereka sering memperlakukan buruh dengan cara tidak manusia seperti jam kerja yang melebihi batas ketentuan, tempat kerja dengan fasilitas yang tidak memadai dan lainnya. Pemerintah juga cenderung bersifat represif terhadap para buruh, dimana setiap buruh melakukan aksi akan ditekan dan ditentang habis-habisan oleh pemerintah. Kemudian pada masa pemerintahan Hu Jintao buruh mendapatkan sedikit harapan tatkala pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru mengenai masalah buruh. Tindakan pemerintah pada saat itu juga berkaitan dengan prioritas dari pemerintahan Hu Jintao sendiri yang ingin mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat China, sehingga kemudian berimplikasi pada kenaikan gaji dari para buruh. Meskipun dalam hal ini China sendiri dirugikan dengan adanya kenaikan gaji, akan tetapi prioritas dari Hu Jintao akan peningkatan taraf hidup rakyat China perlu diberikan apresiasi meskipun dalam segala aspek tentu masih mengalami kekurangan.

Disini penulis menyimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Hu Jintao, buruh sedikit mengalami kemajuan. Dimana aspirasi mereka untuk mengeluarkan tuntutan mereka akan kesejahteraan serta perbaikan gaji diperhatikan oleh pemerintah, selain itu juga sikap pemerintah yang cenderung pro terhadap buruh memberikan harapan buruh bagi para buruh di China. Tindakan yang dilakukan oleh Hu Jintao tentu memiliki dampak tersendiri, yaitu berupa keengganan dari investor asing untuk berinvestasi di China karena mahalanya harga buruh. Meskipun demikian Hu Jintao tetap menaikkan harga buruh dalam rangka mensukseskan prioritas mengenai pengurangan kesenjangan sosial. Karena dalam hal apapun pemerintah memiliki kewenangan yang sangat tinggi, apalagi China yang berideologi komunis peran pemerintah menjadi titik sentral bagi kemajuan serta kemakamuran bangsa, negara dan rakyatnya. Tidak hanya di China, ketegasan suatu pemerintah memang perlu dimiliki oleh setiap negara agar negaranya tidak menjadi negara yang hanya tunduk terhadap institusi-institusi atau lembaga-lembaga internasional yang justru merugikan negara.

Referensi

- David Held *et. al*, 'Introduction', dalam *Global Transformations: Politics, Economics, and Cultures* (Stanford: Stanford University Press, 1999), pp. 1-31
- "China Unrest Spreads Honda Workers Keep Striking" Diakses di <http://www.libcom.org/news/china-unrest-spreads-honda-workers-keep-striking-13062010>, 15 Juni 2013
- Ghani, N.c, *Meneropong China*, Diakses di <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/04/20/meneropong-china-123033.html> 13 juni 2013
- I Wibowo, *Belajar dari China (Bagaimana China Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi)*, PT. Kompas; Jakarta, 2007, hal 190
- I Wibowo, *China Membela Buruhnya!*, Diakses di <http://cetak.kompas.com/read/2010/06/24/03132197/china.membela.buruhnya>, 15 Juni 2013
- Melvin, Sheila, *The Little Red Book Of China Business*, PT. Karya Kita: Bandung, 2008
- Oded Shenkar, *The Chinese Century (Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Global)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Gramedia: Jakarta, 2007.
- Shenkar, Oded, *The Chinese Century (Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Global)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Gramedia: Jakarta, 2007
- Solinger, Dorothy J, "Labour Market Reform and the Plight of the Laid-off Proletariat", dlm *China Quarterly*, No. 170 (Juni 2002), hlm. 315-325.
- Willy Wo-Lap, Lam, *Chinese politics in the Hu Jintao era: new leader, new challenges*, An East Gate Book, New York, 2006